

346.04
514
p 21

TESIS

**PERAN SERTA BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM
PENGEMBANGAN PENGUSAHA KECIL DI KABUPATEN
KUDUS**



Disusun Oleh :

HENDRICK MANGAPUL ERI SYAHPUTRA SIAHAAN, SH.

B4B 001130

PROGRAM PASCA SARJANA (S2) MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2003

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN SERTA BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM
PENGEMBANGAN PENGUSAHA KECIL DI KABUPATEN KUDUS**

Disusun oleh :

HENDRICK MANGAPUL ERI SYAHPUTRA SIAHAAN, SH.

B4B 001130

Tesis ini telah disetujui pada tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai

Persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan

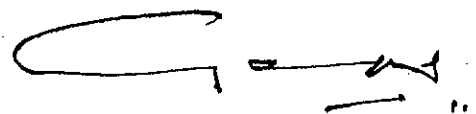
Mengetahui

Dosen Pembimbing

Ketua Program



Hj. SRIE WILETNO, SH. MS



Prof. I.G.N. SUNGGAGA. SH

LEMBAR PERSETUJUAN
PERAN SERTA BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM
PENGEMBANGAN PENGUSAHA KECIL DI KABUPATEN KUDUS

Disusun oleh :

HENDRICK MANGAPUL ERI SYAHPUTRA SIAHAAN,SH.

B4B 001130

Tesis ini telah dipertahankan di depan para penguji pada
tanggal 31 Desember 2003 dan dinyatakan telah Memenuhi
syarat untuk diterima sebagai persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister Kenotariatan

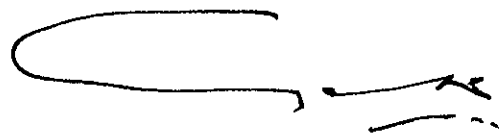
Dosen Pembimbing



Hj. SRIE WILETNO, SH.MS

Mengetahui

Ketua Program



Prof. I.G.N. SUNGGAGA, SH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Khalik langit dan Bumi atas berkat dan kasih Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Penyusunan Tesis yang berjudul **“PERAN SERTA BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM PENGEMBANGAN PENGUSAHA KECIL DI KABUPATEN KUDUS”** ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata dua pada Fakultas Hukum Jurusan Magister Notariat Universitas Diponegoro Semarang.

Keberhasilan penyusunan tesis ini tidak terlepas tanpa adanya bantuan baik yang bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo. Msc, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Achmad Busro, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. I.G.N. Sunggaga, SH, selaku ketua Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak R.Suharto, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang.
5. Ibu Hj. Srie Wiletno, SH, MS, selaku Dosen Pembimbing tesis.

6. Bapak H.A.Tulus Sartono, SH, MS, selaku tim penguji review proposal tesis.
7. Bapak Suradi, SH. M.Hum, selaku tim penguji review proposal tesis.
8. Bapak Eri Agus Priyono, SH, Msi, selaku tim penguji review proposal tesis.
9. Bapak/ Ibu dosen yang telah mendidik selama penulis kuliah di Universitas Diponegoro Semarang.
10. Bapak Pimpinan BPR. PT. "DANANTA" Kudus dan seluruh karyawan.
11. Bapak Pimpinan BPR PT."BALI BUDIKUSUMA MANDIRI" Kudus dan seluruh karyawan.
12. Kedua orang tua penulis yang telah mendidik dan membesarkan penulis serta membiayai penulis selama kuliah.
13. Kakak Rina Siahaan. SE dan Lae Ir.E.Sibuea dan dua keponakanku Batara Sibuea dan Rachel Sibuea atas dukungannya.
14. Kakak Linda Siahaan, Amd dan Lae Adi Palasa, Amd, beserta keponakanku George William Palasa atas dukungannya.
15. Adik-adikku Triwan Siahaan. SE, dan Juli Siahaan. Amd, atas dukungannya.
16. Kekasihku Eva Risma Margaretha. Amd, makasih atas dukungan, cinta dan doamu.
17. Teman-teman kost (Munir Sinaga SH. Mkn, Jeni Saragih, SH. Mkn, Ernes SE, Wiwik ST, Tanti SE, Wawan SE) dan teman-teman Notariat angkatan 2001 khususnya kelas B.

18. Semua pihak yang telah membantu demi selesainya tesis ini yang namanya tidak dapat disebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca akan penulis terima demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat untuk semua terutama bagi penulis dan BPR yang ada di Kudus.

Semarang, Desember 2003

Penulis

Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada suatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan dimana perlu.

Semarang, Desember 2003

Yang Membuat Pernyataan



(Hendrick Mangapul Eri Syahputra Siahaan,SH)

ABSTRAK

Keadaan perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami kemunduran, hal ini disebabkan karena banyak terjadi gejolak disegala bidang, maka perekonomian sekarang ini sangat membutuhkan perhatian yang sangat besar dari berbagai sektor guna melaksanakan pembangunan yang salah satunya adalah pembangunan ekonomi.

Dalam rangka pembangunan dibidang ekonomi, maka perlu diberikan perhatian kepada pengusaha terutama pengusaha kecil yang melakukan usahanya secara tradisional sehingga dapat bersaing, untuk itu Lembaga Keuangan baik bank maupun bukan bank hendaknya lebih ditingkatkan perannya agar lebih aktif dalam penyediaan dana dan memberikan kemudahan bagi para pengusaha kecil.

Berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank dibagi menjadi 2(dua) yaitu :

1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat sebagai salah satu jenis bank yang keberadaannya diwujudkan untuk memberikan pelayanan jasa dibidang perbankan terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah yang ada di pedesaan.

Demikian halnya dengan keberadaan Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Kudus, didirikan dengan tujuan selain untuk mencari keuntungan juga diharapkan dapat membantu mengembangkan pengusaha kecil untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat yang ada di Kudus, dalam hal penyediaan dana kredit bagi pengusaha kecil yang meliputi Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi yang mempunyai persyaratan lunak dan prosedur sederhana yang bertujuan untuk membantu dan mendorong pengusaha kecil di Kudus untuk meningkatkan usaha yang bersifat padat karya.

ABSTRACT

Now on, Indonesia is experiencing deterioration in economy sector, because there are so much fluctuations happen on all area, so that the economy today needs much more attention from many area in order to bring about the development, which is included the economical development.

On economical development, we need to pay attention to the entrepreneur, especially minor entrepreneur, who carry out their work traditionally in competing, so that the financial institutions, both bank and non bank, are intended to increase their role to be more active on supplying the fund and facilitating minor entrepreneurs.

Based on section 5 decree Number 10 year of 1998 related to banking, bank is divided into two kinds, they are :

1. Public Bank
2. Public Credit Bank

Public credit bank is a kind of bank which is used to supply service on banking field especially to the low level economy society on villages.

So is the Public Credit Bank on Kudus, it is formed – besides to get profits – to help on improving minor entrepreneur on increasing their income and improving the life grade of society on Kudus by supplying credit fund for minor entrepreneur. This fund covered Work Capital Credit and Investment Credit with light prerequisites and simple procedures which is purposed to help and motivate minor entrepreneur on Kudus to improve their works in nature of low technology industries.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	I
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Pustaka	vi
Lampiran	vii

BAB I : PENDAHULUAN

a. Latar Belakang masalah	1
b. Perumusan Masalah	4
c. Tujuan Penelitian	4
d. Manfaat Penelitian	5
e. Sistematika Penulisan	6

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

I. TINJAUAN UMUM TENTANG BANK

a. Pengertian Tentang Bank	8
b. Falsafah Kredit	9
c. Pengertian Kredit	10
d. Unsur Kredit	11
e. Jenis Kredit	14
f. Perjanjian Kredit	16
g. Pengertian Pendapatan	26

II. TINJAUAN UMUM TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT

a. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat	27
------------------------------------------	----

b. Dasar Hukum Bank Perkreditan Rakyat	30
c. Dasar Hukum dan Persyaratan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat	32
d. Tugas dan Tujuan Bank Perkreditan Rakyat ..	34

BAB III : METODE PENELITIAN

a. Metode Penelitian	38
b. Sfesifikasi Penelitian	38
c. Tehnik Pengumpulan Sampel	40
d. Tehnik Pengumpulan Data	41
e. Analisa Data	42

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Peran Serta Bank Perkreditan Rakyat Bagi Pengusaha Kecil Di Kudus.

a. Hasil Penelitian	44
b. Pembahasan	48

II. Hambatan-hambatan Yang Mempengaruhi Pemberian Kredit Modal Bagi Pengusaha Kecil Di Kudus.

a. Hasil Penelitian	49
b. Pembahasan	53

III. Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Bank Perkreditan Rakyat Bila Terjadi Hambatan-hambatan.

a. Hasil Penelitian	54
b. Pembahasan	58

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadaan perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami kemunduran, hal ini disebabkan karena banyak terjadi gejolak disegala bidang, maka perekonomian sekarang ini sangat membutuhkan perhatian yang sangat besar dari berbagai sektor, berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan "Memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang termasuk di dalamnya adalah pembangunan di bidang ekonomi.

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara menyebutkan bahwa, pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan pada pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen serta perlakuan yang adil bagi masyarakat.

Dalam rangka pembangunan di bidang ekonomi, maka perlu diberikan perhatian kepada pengusaha terutama pengusaha kecil untuk mengembangkan pengusaha kecil yang melakukan usahanya secara tradisional, sehingga dapat

mencapai arah pembangunan ekonomi tersebut, maka Lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank hendaknya lebih di tingkatkan fungsi dan peranannya agar lebih aktif dalam pembangunan terutama dalam penyediaan dana dan kemudahan bagi para pengusaha kecil dalam pengembangan usahanya.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ditetapkan bahwa bank menurut jasanya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Bank Umum.
2. Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Perkreditan Rakyat sebagai salah satu jenis bank yang keberadaannya diwujudkan untuk memberikan pelayanan jasa di bidang perbankan terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan masyarakat yang ada di pedesaan. Dengan adanya Bank Perkreditan Rakyat di harapkan pengusaha kecil dan masyarakat golongan ekonomi lemah mendapat saluran dana untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan usahanya guna meningkatkan pendapatan.

Demikian halnya dengan keberadaan Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Kabupaten Kudus, didirikan dengan tujuan selain untuk mencari keuntungan juga diharapkan dapat membantu mengembangkan usaha kecil untuk meningkatkan pendapatan bagi pengusaha kecil di Kudus. Untuk dapat meningkatkan produksi dari pengusaha kecil tersebut di butuhkan dana, maka lembaga-lembaga keuangan dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyat berperan membantu dalam penyediaan kredit bagi pengusaha kecil, meliputi Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi,

fasilitas kredit itu mempunyai persyaratan yang lunak dan prosedur sederhana yang bertujuan untuk membantu dan mendorong pengusaha kecil di Kudus untuk meningkatkan usaha yang bersifat padat karya.

Kredit Investasi ini hanya diberikan kepada pengusaha kecil yang berekonomi lemah yang digunakan untuk semua kegiatan ekonomi terutama unit-unit produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan Kredit Modal Kerja (KMK) diberikan kepada pengusaha kecil dengan persyaratan dan prosedur khusus guna pembiayaan modal yang digunakan terus-menerus untuk kelancaran usahanya.

Dengan adanya Bank Perkreditan Rakyat di Kudus maka diharapkan dapat membantu para masyarakat/peguusaha kecil dalam hal :

1. Penambahan modal dengan prosedur yang mudah dan aman.
2. Peningkatan produksi.
3. Kelancaran Peredaran barang.
4. Menghimpun dana atau tabungan usaha kecil dengan aman.

Dalam praktek kehidupan sehari-hari di masyarakat/pengusaha kecil di Kudus, mereka malas datang ke bank bila mereka ingin meminjam uang atau menabung, hal ini disebabkan karena pertama kendala “jarak fisik” yaitu lembaga-lembaga keuangan dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Kudus berada di kota kecamatan atau berada dipusat kegiatan ekonomi/pemerintahan jauh dari tempat tinggal masyarakat yang berada di pelosok desa, dan kedua adalah kendala “jarak sosial” yaitu kemiskinan dan

rendahnya pendidikan masyarakat mengenai pengetahuan tentang bank. Hal ini hal ini dapat dilihat karena masih banyak masyarakat di Kudus meminjam uang dari para pelepas uang/rentenir meskipun dengan beban bunga yang tinggi, karena masyarakat menganggap bahwa lembaga keuangan informal ini lebih dekat dengan mereka dan tanggap atas keperluan mereka.

Selain itu yang menjadi penghambat bagi Bank Perkreditan Rakyat di Kudus dalam memberikan kredit modal bagi pengusaha kecil adalah Lembaga keuangan non formal seperti pelepas uang/rentenir, koperasi simpan- pinjam, tukang kredit barang, tengkulak dan pedagang, serta petani kaya yang memperoleh kelebihan dari hasil pertaniannya sehingga dapat membuka usaha perdagangan, sehingga bila ini terjadi maka nasabah yang menerima kredit dari bank akan kehilangan pasar untuk menjual produk usahanya sehingga akan mempengaruhi penghasilan usahanya

Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha kecil/perusahaan golongan ekonomi lemah adalah pengusaha/perusahaan yang sekurang-kurangnya 50 % modal yang disetor dimiliki orang Indonesia asli, serta kekayaan bersih usaha tidak melebihi Rp 300.000.000,- yang berlaku untuk semua sektor ekonomi, tidak termasuk nilai tanah dan rumah yang ditempati¹.

Dari uraian diatas tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang “ *Peran Serta Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengembangan Pengusaha Kecil Di Kabupaten Kudus*”.

¹ Bank Indonesia, 1997, *Proyek Kredit Mikro-Pengentasan Kemiskinan Melalui Kredit*, Jakarta.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran serta Bank Perkreditan Rakyat dalam pengembangan pengusaha kecil di Kabupaten Kudus?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi pemberian kredit modal usaha melalui Bank Perkreditan Rakyat terhadap pengusaha kecil di Kudus?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Kudus bila terjadi hambatan-hambatan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran serta Bank Perkreditan Rakyat dalam pengembangan pengusaha kecil di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi pemberian kredit modal usaha melalui Bank Perkreditan Rakyat terhadap pengusaha kecil di Kudus.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Kudus bila terjadi hambatan-hambatan.

D. Manfaat Penelitian.

Hasil dari penelitian ini diharapkan kiranya dapat dijadikan :

1. Memberikan informasi/gambaran kepada BPR dalam memberikan jasa perbankan kepada para nasabahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk mengumpulkan data/informasi dalam kaitannya dengan pemberian kredit kepada para pengusaha kecil.
3. Untuk menyelesaikan permasalahan bila terjadi wanprestasi.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian dianalisis dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan, yang berisi uraian tentang : Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.
- BAB II** : Tinjauan Pustaka, yang berisi uraian tentang : Pengertian Tentang Bank, Falsafah Kredit, Pengertian Kredit, Unsur Kredit, Jenis Kredit, Perjanjian Kredit, Pengertian Pendapatan, Sejarah Bank Perkreditan Rakyat Dasar Hukum BPR, Bentuk Hukum BPR, Tujuan dan Tugas BPR.
- BAB III** : Metodologi Penelitian, yang berisi uraian tentang : Metode Pendekatan, Sfesifikasi Penelitian, Populasi Dan Metode Sampling, Metode Pengumpulan Data dan Analisa Data.

BAB IV : Pembahasan, yang berisi uraian tentang : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi Peran serta BPR dalam Pengembangan pengusaha kecil di Kudus, Hambatan-Hambatan yang mempengaruhi pemberian kredit Modal Bagi pengusaha kecil di Kudus, dan Penyelesaian yang dilakukan oleh BPR untuk menyelesaikan hambatan.

BAB V : Penutup, yang berisi uraian tentang Saran dan Kesimpulan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

TINJAUAN UMUM TENTANG BANK SEBAGAI LEMBAGA PENYALUR KREDIT DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

A. Pengertian tentang Bank

Bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan antara debitur dan kreditur.

Dengan demikian fungsi dari bank mencakup tiga hal pokok yaitu :

1. Sebagai pengumpul dana.
2. Sebagai penjamin kredit antara debitur dan kreditur.
3. Sebagai penanggung resiko dari tingkat suku bunga rendah ke tingkat suku bunga tinggi.³

Pengertian diatas merupakan pengertian umum yang menggambarkan fungsi bank secara pokok sebagai pengumpul dan penyalur dana.

Dilihat dari fungsinya macam – macam bank dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. Bank dapat dilihat sebagai penerima kredit, dalam pengertian bank menerima uang serta dana – dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk :
 - Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta atau diambil kembali setiap saat.

³ Rudy Tri Santoso, 1993, *Mengenal Dunia Perbankan*, Yogyakarta, Hal 1 – 2

- Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta atau diambil kembali setiap saat.
- Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis.
- Simpanan dalam rekening Koran atau Giro atas nama si penyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah tertulis kepada bank.

Pengertian ini mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga.

2. Bank dilihat sebagai pemberi kredit, berarti bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Jadi fungsi bank tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber ada penciptan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.
3. Bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan atau tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.⁴

B. Falsafah Kredit

Untuk memenuhi kebutuhannya manusia selalu berusaha untuk mencapai hasil dan pencapaian hasil ini haruslah menggunakan faktor yang penting yaitu permodalan. Bank selaku lembaga pembantu modal disitu pihak

⁴ Thomas Suyatno, et, al, *Kelembagaan Perbankan*, PT, Gramedia, Jakarta, Jakarta, hal. 1 – 3

berusaha dengan sungguh – sungguh untuk membantu mereka yang membutuhkan permodalan, di lain pihak pengusaha akan selalu mencari sumber – sumber permodalan untuk menjamin peningkatan usahanya. Disinilah kemudian timbul sifat ketergantungan satu sama lain. Sebagai lembaga keuangan bank adalah lembaga kredit. Di dalam menjalankan kedua tugas pokok ini bank dihadapkan pada satu kenyataan bahwa sumber operasinya justru berada di masyarakat, demikian pula untuk melepas kredit. Sebaliknya masyarakat memerlukan bantuan kredit dan jasa – jasa bank dalam memperlancar tujuan usahanya. Timbullah kemudian langkah – langkah menyelaraskan antara keduanya. Dalam melakukan penyesuaian ini terdapat maksud yang selaras yaitu tujuan setiap memperoleh keuntungan. Dengan demikian kredit dapat menempatkan dirinya sebagai perangsang dari kedua belah pihak.

Kepentingan dan keuntungan yang diharapkan baik oleh masyarakat maupun oleh bank tercermin dalam dua langkah kegiatan pokok yaitu menerima dan menghimpun dana. Para penabung mengharapkan keuntungan dari uang yang ditabung sebaliknya bank memperoleh keuntungan berupa uang yang mengendap akan dioperasikan dalam bentuk kredit. Begitu juga si penerima kredit memperoleh keuntungan bahwa masalah permodalan dapat diatasi sehingga peningkatan produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan. Sebenarnya, perlu diketahui perkreditan merupakan pendorong keberhasilan para pengusaha.

C. Pengertian Kredit

Kredit terutama kredit dengan bunga yang wajar merupakan unsur yang penting untuk mendorong kegiatan dan perkembangan perekonomian baik bagi pengusaha besar, menengah, maupun kecil, maka apabila kita lihat dalam kehidupan sehari – hari kata kredit sudah sedemikian populernya dalam kalangan masyarakat baik masyarakat umum masyarakat industriawan. Namun kata kredit di kalangan masyarakat umum secara sederhana diartikan sebagai pembelian suatu barang atau benda tertentu dengan membayar secara mencicil, sementara di kalangan industriawan kata kredit dikenal sebagai pemberian sejumlah uang tertentu oleh suatu bank kepada pihak lain yang memerlukannya untuk keperluan usahanya dimana pihak lain ini akan melunasinya dalam jangka tertentu dengan membayar sejumlah bunga yang telah ditentukan.

Kredit berasal dari bahasa Yunani yang berarti percaya, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan baik menyangkut jangka waktunya maupun prestasi. Kondisi dasar seperti ini diperlukan oleh bank karena dana yang ada di bank sebagian besar milik pihak ketiga, untuk itu diperlukan kebijaksanaan oleh bank dalam penggunaan dana termasuk didalamnya untuk menentukan pemberian kredit. Bank merupakan lembaga penyalur kredit bagi masyarakat dimana masyarakat dapat meminjam untuk meningkatkan usahanya karena usaha pokok dari bank adalah memberikan kredit. Pada dasarnya bank merupakan suatu subyek hukum yang

didalamnya melekat hak – hak dan kewajiban. Menurut Pasal 8 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa di dalam memberikan kredit Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang kemudian ada perubahan dalam Pasal 8 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa di dalam memberikan kredit pembiayaan atau berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

D. Unsur Kredit

Selain unsur kepercayaan dalam memberikan kredit ada unsur lainnya yaitu mempunyai sifat atau pertimbangan saling tolong menolong. Di lihat dari kreditur unsur yang penting dalam kegiatan kredit adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan kontraprestasi, sedangkan bagi debitur adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi

kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan oleh kreditur. Dengan adanya pemisahan jangka waktu antara prestasi dengan kontraprestasi maka akan mengakibatkan adanya resiko dan karenanya diperlukan jaminan dalam pemberian kredit. Menurut Drs. Thomas Suyatno unsur yang terdapat dalam kredit adalah :

1. *Kepercayaan*, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa akan diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu.
2. *Tenggang waktu*, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari.
4. *Prestasi*, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang dan jasa.⁵

Tujuan dasar kredit adalah untuk pencapaian suatu tujuan tertentu yang tidak boleh merugikan tujuan lainnya, bahkan harus saling menunjang atau dapat dicapai bersama.

⁵ Thomas Suryatno, et al, 1993, *Dasar – dasar Perbankan*, Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 12

Tujuan perkreditan harus diarahkan untuk kepentingan bank yaitu :

1. Membantu perkembangan kegiatan ekonomi sesuai dengan kebijaksanaan dan program pemerintah dengan tetap mendasarkan pada persyaratan bank secara teknis dan wajar.
2. Mencari keuntungan yang layak bagi bank.
3. Membantu perluasan pemanfaatan jasa – jasa perbankan lainnya.⁶

Tujuan kredit bagi masyarakat adalah untuk membantu para pengusaha – pengusaha untuk dapat menyelesaikan usahanya guna untuk meningkatkan pendapatan, untuk membuka lapangan kerja baru, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari bagi para pedagang kecil.

Fungsi Kredit

Kredit pada awalnya fungsi untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong guna pencapaian kebutuhan usahanya maupun kebutuhan sehari – hari. Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik karena mereka akan memperoleh keuntungan dan peningkatan kesejahteraan. Untuk sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya guna uang.
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Meningkatkan kegairahan berusaha.
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan.
5. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

⁶ Rudy Tri Santoso, 1993, *Op. Cit*, Hal 111

E. Jenis Kredit

Kredit terdiri dari beberapa jenis bila dilihat dari beberapa segi pandangan, dalam hal ini jenis kredit yang ada tidak bisa dipisahkan dari kebijakan perkreditan yang digariskan sesuai dengan tujuan pembangunan.

1. Jenis kredit dilihat dari segi lembaga pemberian – pemberian kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit Indonesia, jenis kredit terdiri dari :

a. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan konsumsi.

Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.

b. Kredit Likuiditas

Yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank – bank yang beroperasi di Indonesia digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditan.

c. Kredit Langsung

Yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah.

2. Dari segi tujuan penggunaan kredit jenis kredit terdiri dari :

a. Kredit konsumsif

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari – hari.⁷

b. Kredit produktif, baik kredit investasi maupun eksploitasi.

Kredit investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan tetap yaitu peralatan produksi, gedung dan mesin – mesin.

Kredit eksploitasi yaitu yang ditujukan untuk menggunakan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi.

c. Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif.

Yaitu kredit yang sangat terikat dengan dokumen – dokumen berharga yang memiliki substitusi nilai jumlah uang dan dokumen tersebut merupakan jaminan pokok pemberian kredit.

3. Dari segi besar kecilnya aktivitas perputaran usaha yaitu melihat dinamika, sektor yang digeluti, asset yang dimiliki maka jenis kredit dibedakan menjadi :

a. Kredit kecil

Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.

⁷ Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 24

Yang termasuk usaha kecil adalah kegiatan usaha yang asetnya di luar tanah dan bangunan yang ditempati tidak melebihi Rp. 600.000.000,00 sedangkan maksimum kredit yang dapat diberikan adalah Rp 200.000.000,00.

b. Kredit menengah

Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar dari pada pengusaha kecil.

c. Kredit besar

Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha dengan kredit menengah.

F. Perjanjian Kredit

Pemberian kredit berarti pemberian kepercayaan dari pihak pemberi, artinya pihak penerima akan mempergunakan prestasi yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan mempunyai kesanggupan untuk mengembalikan pada waktu tertentu di masa yang akan datang.

Pada hakekatnya tugas pokok bank adalah menerima dan memberi kredit. Sumber pendapatan utama bank adalah dari bunga kredit. Dengan demikian bagaimanapun juga bank harus menaruh perhatian sepenuhnya terhadap segala hal yang berkaitan dengan operasi perkreditan.

Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat bank. Diinstruksikan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank – bank wajib menggunakan “akad perjanjian kredit”. Instruksi demikian di muat di dalam instruksi presidium cabinet

No15/EKA/10/1966 yo Surat Edaran Bank Indonesia No.2/643/UPK/Pem/1966 tentang pedoman kebijaksanaan di bidang perkreditan.⁸ Menurut Prof. R Subekti, SH yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Satu hal pokok yang harus kita ketahui agar perjanjian itu mempunyai kekuatan adalah syarat sahnya perjanjian.

Mengenai syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan bahwa sahnya persetujuan – persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam mengganti, mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank. Pasal 1754 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian mengganti ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Pemberian kredit dari pihak bank biasanya didasarkan atas pertimbangan – pertimbangan tertentu, di satu segi pemberian kredit berarti

⁸ The Aman, Edi Putra, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, Hal.30

menghadapi kemungkinan – kemungkinan tertimpa resiko dan di segi lain pendapatan bank terutama berasal dari kegiatan kredit. Sebelum permohonan kredit dikabulkan bank harus memperhatikan hal – hal yang menyangkut :

1. Keadaan intern bank.
2. Keadaan calon nasabah (peminjam).

Keadaan – keadaan intern bank yang harus diperhatikan adalah plafond kredit.

Plafond kredit adalah batas maksimum bagi bank untuk mengoperasikan dananya.

Jadi terhadap permohonan kredit yang masuk bank harus memperhatikan apakah sektor yang dimintakan kreditnya itu masih terbuka plafondnya atau tidak.

Setelah bank memperhatikan keadaan internnya dan mampu menyediakan dananya bagi pemohon kredit maka sebagai langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan permohonan kreditnya.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan atas permohonan kredit adalah yang menyangkut :

- Pribadi peminjam.
- Harta bendanya.
- Usahanya.
- Kesanggupan dan kemampuan membayar kembali.

Didalam dunia perbankan terdapat suatu prinsip yang senantiasa di pegang teguh yaitu bahwa kredit yang dikeluarkan atau dilepaskan harus dapat

diterima kembali sesuai dengan perjanjian, lebih – lebih karena uang tersebut adalah uang yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Dengan mengingat hal – hal tersebut diatas maka bank di dalam mengabulkan suatu permohonan kredit senantiasa selektif.

Ukuran – ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah suatu permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak dikenal adanya beberapa formulasi. Formulasi yang pertama disebut “The P’s of Credit Analysis” yang terdiri atas :

1. Personality.

Personality disini menyangkut kepribadian si peminjam seperti riwayat hidup, hobby, keadaan keluarga dan hal – hal yang lain berhubungan dengan kepribadian calon nasabah.

2. Purpose.

Hal ini menyangkut tentang maksud dan tujuan pemakaian.

3. Payment.

Kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan kreditnya.

4. Prospect.

Yang dimaksudkan dengan prospect disini adalah harapan masa depan dari usaha si pemakai.

Formula lainnya yang juga dikenal dalam dunia perbankan adalah “The five C’s of Credit Analysis”⁹, yang terdiri dari :

⁹ Mgs Edi Putro. Tje Anan, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberry, Yogyakarta, 1995, hal 12 – 15.

1. Character
2. Capacity
3. Capital
4. Collateral
5. Condition

1. Character (kepribadian, watak)

Kepribadian, moral dan kejujuran dari calon nasabah perlu diperlukan sehubungan untuk mengetahui apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik yang timbul dari persetujuan kredit yang akan diadakan. Seorang debitur yang hanya bersedia melunasi hutangnya dengan paksaan sulit dapat diberikan kredit. Dengan demikian character merupakan salah satu faktor yang turut menentukan disetujui atau tidaknya permohonan kredit yang diajukan. Hal-hal yang diperhatikan sehubungan dengan character adalah sifat pribadi yang meliputi sehari-hari atas diri calon nasabah, cara hidup, keadaan keluarga, hobby, pergaulannya dalam masyarakat, riwayat hidup dan lain – lain.

2. Capacity (kemampuan/kesanggupan).

Yang dimaksudkan dengan capacity disini adalah kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan.

Kemampuan calon nasabah dapat dilihat antara lain dari :

- Pengetahuannya tentang usaha yang dihubungkan dengan pendidikan baik umum maupun kejuruan.

- Pengalaman-pengalaman usahanya dalam menyelesaikan diri dengan kondisi perekonomian serta mengikuti perkembangan kemajuan teknologi.
- Kekuatan perusahaan sekarang dalam sektor usaha yang dijalankan.

Dari beberapa hal yang diteliti sehubungan dengan capacity adalah kemampuan membayar dari calon nasabah bila permohonan kreditnya dikabulkan .

3. Capital (modal, kekayaan)

Capital adalah modal usaha dari calon nasabah yang telah tersedia atau telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Keadaan, struktur, dan sifat permodalan tersebut akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit bank yang akan diberikan tambahan modal.

Dalam meneliti faktor kapital, yang perlu diteliti antara lain :

- Apakah perusahaan calon nasabah mempunyai modal yang cukup untuk menjalankan usahanya.
- Bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh calon nasabah.

4. Collateral (jaminan, agunan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Jaminan ini bersifat sebagai jaminan tambahan karena jaminan utama kredit adalah pribadi calon nasabah dan usahanya. Dengan adanya jaminan bank mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali pada suatu saat yang ditentukan. Mengenai benda jaminannya itu sendiri dapat berupa benda tetap dan dapat pula benda itu tidak tetap.

Sehubungan dengan benda jaminan tersebut hal – hal yang perlu diteliti .
antara lain :

- Surat tanda bukti milik dari benda jaminan.
- Apakah benda yang akan diikatkan sebagai jaminan telah diasuransikan.

5. Condition

Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan permohonan kredit tidak saja kondisi ekonomi pada sektor usaha calon nasabah tetapi juga kondisi ekonomi secara umum dimana perusahaan calon nasabah itu berada.

Misalnya keadaan perdagangan serta persaingan di lingkungan usaha calon nasabah.

Di dalam menilai faktor kondisi ekonomi hendaknya diperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- Kedudukan usaha calon nasabah dalam bidang usaha sejenis dalam daerah setempat.
- Kemungkinan – kemungkinan pemasaran dari hasil produksinya.
- Keadaan ekonomi pada umumnya yang mungkin dapat mempengaruhi usaha calon nasabah dan lain sebagainya.

Dengan memperhatikan dan mengetahui hal-hal tersebut dapat diharapkan bantuan kredit yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya.

Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit dapat dilalui sejak pengajuan permohonan kredit sampai relaisasi kredit, adalah sebagai berikut :

1. Calon nasabah mengajukan permohonan kredit secara tertulis ke bank pelaksana terdekat yang alamat atau tempat tinggalnya termasuk dalam wilayah kerja bank yang dituju dan sesuai dengan bidang atau sektor ekonomi yang telah ditentukan.
2. Calon nasabah mengisi daftar isian atau formulir atau blanko yang telah disediakan bank.
3. Bank melakukan penelitian atau menganalisa terhadap dana yang tersedia dan pribadi calon nasabah serta segala sesuatu yang disyaratkan yang berhubungan dengan usaha calon nasabah.
4. Setelah bank selesai mengadakan analisa dan semua persyaratan terpenuhi dilakukan penandatanganan perjanjian kredit.
5. Penarikan kredit atau realisasi kredit.

Dengan diketahuinya prosedur pemberian kredit berarti secara tidak langsung dapat pula diketahui hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon nasabah sebelum atau dalam mengajukan permohonan kreditnya ke bank pelaksanaan terdekat.

Dalam kaitannya dengan pemberian kredit pada dasarnya terdapat perbedaan antara Undang – Undang yang lama (Undang – Undang No 14 tahun 1967) dengan Undang – Undang Perbankan yang baru (Undang –

Undang No 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang – Undang No. 10 tahun 1998).

Perubahan sebagai berikut :

1. Undang – Undang perbankan lama.
 - a. Pemberian jaminan kredit adalah bersifat mutlak (Pasal 24 ayat 1)
 - b. Jaminan adalah pengertian luas yaitu jaminan yang bersifat materiil dan imateriil (penjelasan pasal 24 ayat 1).
2. Undang – Undang perbankan baru.
 - a. Pemberian kredit tidak memerlukan adanya jaminan, di sini bank harus memperhatikan faktor yang penting yaitu keyakinan atas kemampuann dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang yang sesuai yang diperjanjikan (pasal 8).
 - b. Bank tidak wajib meminta agunan tambahan.¹⁰

Fungsi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kredit maupun oleh masyarakat sebagai debitur karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaanya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi diantaranya :

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya

¹⁰ Bambang Sunggono, 1995, *Pengantar Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Jember, hal. 130

perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.

2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan – batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.¹¹

Analisa Kredit

Adalah langkah yang kemudian dilakukan setelah tahap persiapan kredit selesai. Analisa ini dilakukan terhadap permohonan kredit nasabah. Analisa ini dibuat tertulis agar persetujuan atau penolakan suatu kredit, sehingga pejabat dapat membuat keputusan yang jelas. Selain itu analisa tertulis merupakan bagian dari berkas kredit yang menjadi bukti tertulis guna review dikemudian hari oleh manager lain atau auditor. Tujuan analisis kredit adalah kredit yang diberikan dapat mencapai sasarannya yaitu :

- Aman, mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian.
- Kearah, maksudnya kredit digunakan sesuai dengan yang dimaksud dalam permohonan kredit.
- Menghasilkan, maksudnya kredit diatas atau akan menghasilkan bagi bank dan bagi nasabah.

¹¹ Mohammad Djumhana, 1996, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 241 – 242.

G. Pengertian Pendapatan.

Pendapatan merupakan hasil berupa uang atau hasil berupa materiil yang dicapai penggunaan kekayaan atau jasa – jasa lainnya.

Menurut kamus Dr. Winardi, SE yang dimaksud dengan pendapatan adalah :

1. Pendapatan seperti yang digunakan dalam ilmu ekonomi adalah hasil berupa uang atau hasil lainnya yang di capai pada penggunaan kekayaan dan jasa-jasa manusia.
2. Bila dipergunakan dalam bidang pembukuan maka artinya luas yaitu pada umumnya Pendapatan sebuah perusahaan atau individu.¹²

Pengusaha Kecil/perusahaangolongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang sekurang-kurangnya 50% modal yang disetor di miliki orang Indonesia asli, serta kekayaan bersih usaha tidak melebihi Rp 300.000.000,- yang berlaku untuk semua sektor ekonomi, tidak termasuk nilai tanah dan rumah yang di tempati

Dengan melihat betapa pentingnya pendapatan maka orang yang satu dengan orang yang lainnya akan saling berusaha untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal didalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan cara yang ditempuh untuk mendapatkan pendapatan yang satu dengan yang lainnya juga berbeda sesuai dengan kemampuan yang dimilliki.

¹² Winardi, 1986, *Kamus Ekonomi (Inggris – Indonesia)*, Alumni Bandung, Bandung

II. TINJAUAN UMUM TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT

A. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak tahun 1895 jumlahnya belasan ribu dan tersebar di kota – kota sampai ke pelosok – pelosok desa yang jauh dari kota. Kelahirannya dalam tahun 1895 di tengah – tengah pegawai negeri bangsa Indonesia dan para petani serta rakyat kecil lainnya yang terjerat oleh para pelepas uang yaitu rentenir dan pengijon dengan bertujuan untuk membebaskan mereka dari jeratan tersebut, dan untuk meningkatkan kesejahteraan. Sejarah perbankan tidak terlepas dari sejarah politik, demikian pula sejarah BPR. Dalam abad kesembilan belas di negeri Belanda terdapat 3 aliran politik kolonial yang berpengaruh yaitu :

1. Aliran yang ingin mengeksploitasikan tanah jajahan untuk kepentingan negaranya.
2. Aliran liberal, yang ingin membuka tanah jajahan untuk penanaman modal.
3. Aliran politik etnis yang menginginkan diadakannya perbaikan kehidupan rakyat Indonesia yang menderita karena tanam paksa.

VOC (Vereenigde Ost Indische Compagnie) mengeksploitasi Indonesia dengan mengadakan monopoli dan tanam paksa terhadap hasil bumi yang berlaku dipasaran Eropa seperti kopi, cengkih, nila, gula dan lain-lain. Kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda karena mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan peperangan dengan Belgia dan untuk biaya menanamkan kekuasaannya baik dipulau Jawa maupun pulau – pulau lain di

Indonesia, tanam paksa tersebut diteruskan untuk mengatasi kesulitan keuangan. Disamping itu kepada rakyat Indonesia yang dibebani pajak berupa hasil bumi uang dan berupa kerja yang tidak dibayar seperti kerja rodi yang jumlahnya sekitar 100 hari di hitung 12 jam kerja sehari. Sehingga dalam abad ke sembilan belas terjadi proses kemunduran kesejahteraan rakyat Indonesia terutama di daerah perdesaan di pulau Jawa dan Madura. Di samping itu di dalam abad ke sembilan belas mulai terasa adanya peningkatan, jumlah penduduk yang besar. Dengan peningkatan jumlah penduduk yang besar maka daerah – daerah yang sudah padat penduduknya tidak ada lagi tambahan lahan pertanian yang dapat digarap. Sehingga lahan yang sama harus menghidupi jumlah orang yang banyak.

Menurut Van Deventer pelopor politik etnis, dengan makin melaratnya orang – orang Indonesia terutama petaninya maka kebutuhan kredit mereka makin meningkat. Untuk memperoleh kredit tersebut pada waktu itu hanyalah ada kredit dari pelepas uang yang rentenir dan pengijon dengan bunga 100% dan 200% setahun. Dalam akhir abad ke sembilan belas timbul aliran – aliran dalam masyarakat di negeri Belanda maupun di Indonesia yang menghendaki diadakannya lembaga perkreditan untuk penduduk Indonesia dengan bunga yang ringan guna peningkatan atau pencegahan kemerosotan lebih lanjut dari pada kesejahteraan petani, serta peningkatan daya tahan mereka terhadap bencana – bencana yang dapat terjadi.

Pada bulan Desember 1895 di Purwokerto didirikan Bank Priyayi atau Bank Pegawai yang memberikan pinjaman kepada para pegawai negeri, para

tukan dan para petani dengan tujuan membebaskan mereka dari jeratan rentenir dan pengijon. Bank ini didirikan oleh patih dari Purwokerto yaitu R. Bei Aria Wirijaatmadja. Bank ini pada tahun 1897 diperbaiki oleh De Wolff Van Westerode, asisten residen di Purwokerto dan namanya di rubah menjadi Bank Bantuan, Tabungan dan Kredit Pertanian.

Jenis Bank Perkreditan Rakyat pada waktu itu dapat dibagi menjadi empat yaitu :

1. *Bank Rakyat*

Yaitu bank – bank yang didirikan di berbagai kabupaten di Indonesia.

2. *Lumbung Desa*

Yaitu lembaga perkreditan pedesaan yang memberikan pinjamannya dalam bentuk padi dan menerima pengembalian juga dalam bentuk padi.

Hal ini memang disesuaikan keadaan masyarakat pedesaan dan pada waktu itu peredaran uang belum begitu meresap ke dalam masyarakat.

3. *Bank Desa*

Yaitu lembaga perkreditan dalam bentuk uang.

Bank Desa baru dapat didirikan apabila sudah jelas ada kebutuhan akan kredit dalam bentuk uang.

4. Bank Pasar

Bank Pasar ini dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Bank Tani yaitu lembaga yang memberikan pinjamannya kepada para petani untuk mengatasi masa paceklik, membeli bibit, pupuk dan sarana produksi lainnya.
- b. Bank Dagang Desa yaitu bank yang memberikan pinjamannya kepada para pedagang kecil yang angsurannya dilakukan setiap minggu.

Keempat jenis bank ini merupakan unsur dari Bank Perkreditan Rakyat, dan gabungan dari bank – bank tersebut diatas sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia.

B. Dasar Hukum Bank Perkreditan Rakyat

Peranan bank di Indonesia yang sangat penting maka berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/39/KPR/DIR tanggal 5 Juni 1998 tentang Kredit Modal Kerja Bank Indonesia dalam rangka Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan di Indonesia. Di dalam perkembangan lembaga perbankan Indonesia di dalam kegiatannya berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 dimana ketentuan ini disahkan di Jakarta. Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3472.

Perlu disampaikan bahwa Undang – Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 dinyatakan berlaku dengan merubah berlakunya ketentuan Undang –

Undang Perbankan nomor 7 tahun 1992. selanjutnya dalam rangka perubahan tata perbankan di Indonesia ditempuh langkah – langkah antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 guna mencapai pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan termasuk bidang dikeuangan dan ekonomi.
2. Penyusunan kebijaksanaan dibidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkokoh perekonomian nasional.
3. Upaya penyehatan Perbankan Nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank.
4. Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan memutuskan kelayakan pendirian suatu bank.
5. Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyuluhan dana.

Melalui upaya perubahan tersebut dimaksudkan agar perbankan di Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan pembangunan nasional sehingga perannya dalam peningkatan taraf hidup rakyat banyak, pemerataan pembangunan dan hasil – hasil serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dapat terwujud secara lebih nyata dalam

rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

C. Dasar Hukum dan Persyaratan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat.

Mengenai dasar hukum diatur pada Bab III Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada Pasal 21 ayat (2) yaitu berbentuk :

- Perusahaan daerah.
- Koperasi
- Perseroan Terbatas (PT)
- Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia untuk Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan oleh :

- a. Warga negara Indonesia
- b. Badan hukum Indonesia
- c. Pemerintah Daerah
- d. Bersama diantara ketiga di atas

Yang dimaksud dengan bersama diantara ketiganya adalah bahwa dapat dimiliki secara bersama maka selain dapat didirikan oleh masing-

masing pendiri tersebut Undang – Undang membolehkan secara bersama diantara ketiganya mendirikan Bank Perkreditan Rakyat.¹³

Modal yang disetor untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan sekurang – kurangnya sebesar :

1. Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan diwilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan kabupaten / Kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi dan Kerawang.
2. Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan diwilayah Ibukota propinsi di luar wilayah seperti di atas.
3. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan di luar wilayah seperti pada nomor satu dan dua.

Yang dapat menjadi pemilik Bank Perkreditan Rakyat adalah pihak – pihak yang :

1. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Menurut Penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas antara lain :
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - c. Bersedia mengembangkan Bank Perkreditan Rakyat yang sehat.

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan

¹³ Gatot Pramono, 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, hal 20

dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia dan berasal dari kegiatan yang melanggar hukum.

D. Tujuan dan Tugas BPR

1. Tujuan dari Bank Perkreditan Rakyat adalah :

- a. Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- b. Untuk membantu lapisan masyarakat golongan ekonomi lemah agar tidak terjerat oleh rentenir dan pengijon.

2. Tugas dari Bank Perkreditan Rakyat

Adalah memberikan pelayanan jasa – jasa perbankan kepada usaha kecil baik di daerah – daerah pedesaan maupun di kota – kota berupa :

1. Pemberian kredit bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan.
2. Menghimpun dana dari masyarakat terutama di daerah pedesaan.
3. Menggali sumber keuangan dalam rangka menambah pendapatan asli daerah (khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah)

Ad.1 Didalam melaksanakan tugas pemberian kredit Bank Perkreditan

Rakyat harus menyesuaikan dengan keadaan para nasabahnya, karena yang dilayani adalah orang – orang yang sederhana maka cara atau prosedur pelayanannya juga harus sederhana tidak rumit dan tidak berbelit – belit. Pemberian kreditnya harus mudah, cepat dan tepat mengenai jumlah dan waktunya.

Ad.2 Didalam menghimpun dana khususnya yang berupa tabungan Bank Perkreditan Rakyat tidak semata-mata ditujukan kepada pengumpulan jumlah uangnya melainkan kepada usaha untuk menanamkan motivasi menabung. Hal ini perlu dibutuhkan kesadaran menabung secara positif yaitu pemberi pengertian kepada mereka bahwa mereka bahwa mereka perlu menabung untuk memenuhi kepentingannya supaya kesejahteraan mereka menjadi lebih baik.

Ad.3 Apabila Bank Perkreditan Rakyat dapat mengemban tugasnya dengan baik maka Bank Perkreditan Rakyat akan membantu pemerintah mengembangkan usaha kecil pada umumnya khususnya masyarakat di daerah pedesaan sehingga diharapkan :

1. Meningkatkan kedudukan golongan ekonomi lemah agar dapat berperan dalam perekonomian nasional.
2. Memperluas dan membantu kesempatan kerja dengan membuka lapangan kerja baru.
3. Meningkatkan produksi barang dan jasa serta memperlancar arus barang dari pedesaan ke kota begitu juga sebaliknya.
4. Turut menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan.¹⁴

Untuk mencapai tujuan dengan tugas pokoknya Bank Perkreditan Rakyat melakukan usaha meliputi :

¹⁴ Pandu Suharto dan Mudhofir, 1990, *Peran dan Fungsi BPR*, hal 30

1. Pemberian pinjaman kepada pengusaha kecil, karyawan dan pegawai negeri dengan syarat dan prosedur yang mudah dapat dijangkau oleh nasabah.
2. Menerima simpanan dari masyarakat berupa :
 - Deposito dengan suku bunga 1 – 3 bulan bunga 18% setahun.
 - 6 bulan bunga 23,04 % setahun.
 - 12 bulan bunga 24 % setahun.
 - Tabungan dengan suku bunga 18 % per tahun.
 - Tamasya (Tabungan Masyarakat)

Tamasya diperuntukan bagi semua anggota masyarakat, organisasi, yayasan dinas atau instansi, pengusaha.
3. Kemudahan pelayanan

Dalam rangka memberikan kemudahan terhadap masyarakat pedesaan terutama bagi pengusaha kecil atau pengusaha golongan ekonomi lemah maka pelayanan Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut :

 - a. Memberikan kredit dengan suku bunga rendah kepada pengusaha kecil atau pengusaha golongan ekonomi lemah.
 - b. Menyempaikan formulir permohonan pinjaman bagi pengusaha kecil yang memerlukan bantuan kredit
 - c. Menyediakan pembinaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

- d. Penarikan angsuran pinjaman dilakukan menurut ketentuan kedua
belah pihak.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang akurat, maka diperlukan suatu metodologi yang tepat dan sistematis, karena pada hakekatnya metodologi merupakan alat yang lazim dipakai dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman untuk meneliti, mempelajari, menganalisa, dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu metodologi merupakan unsur yang essential yang harus ada dalam suatu penelitian.¹³

Peranan metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H, yaitu :¹⁴

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan dan melaksanakan penelitian secara baik dan lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 6

¹⁴ Ibid, hal 7.

3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan bagian yang harus ada untuk memberikan bobot pada penelitian yang ditujukan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, disamping itu untuk mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul dari hasil penelitian.

A. Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendekatan ditinjau dari aspek-aspek hukum dan pelaksanaan peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

B. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam tesis ini adalah *deskriptif analisis* yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan

menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁵

C. Teknik Penentuan Sampel (Lokasi Penelitian)

Populasi/universe adalah seluruh obyek/individu/gejala/kejadian/unit yang akan diteliti. Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin meneliti seluruh populasi tersebut. Dalam suatu penelitian yang homogen tidak perlu meneliti semua obyek/individu/gejala/unit tersebut untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup sebagian saja untuk diteliti.¹⁶

Pengambilan sampel penelitian dilakukan secara Non-Random Purposive Sampling (penarikan sampel bertujuan), yaitu untuk pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi.

Adapun yang menjadi respondenya adalah :

1. Direktur PT.BPR “DANANTA” Kudus.
2. Direktur PT.BPR “BALI BUDIKUSUMA MANDIRI” Kudus.
3. Sepuluh orang nasabah BPR DANANTA
4. Sepuluh orang nasabah BPR BALI BUDIKUSUMA MANDIRI

¹⁵ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, 1994, hal 73.

¹⁶ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 44.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan.¹⁷ Data Primer dalam penelitian ini dilakukan melalui cara :

- a. Observasi langsung, yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian.
- b. Mengadakan Wawancara secara terstruktur, maksudnya dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman kepada para responden tentang pemberian kredit menurut peraturan perbankan yang berlaku.

2. Data Sekunder, diperoleh dengan cara :

- a. Melakukan studi kepustakaan, yaitu mempelajari sejumlah literatur yang ada khususnya Hukum Perbankan.
- b. Mempelajari peraturan-peraturan hukum perbankan yang berlaku di Indonesia.

E. Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan disiplin ilmu dengan mempergunakan bentuk-bentuk analisa ilmu sosial yang lain sebagai ilmu

¹⁷ Ibid hal 51.

bantu, hasil penelitian ini kemudian disusun dan dilaporkan secara tertulis dalam bentuk tesis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Serta Bank Perkreditan Rakyat Bagi Pengusaha Kecil Di Kudus

- Hasil Penelitian

Secara umum yang dimaksud dengan bank sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sehubungan dengan fungsi pokok bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya sebagai pinjaman, maka bank menduduki posisi penting dalam perekonomian di Indonesia.

Peranan perbankan dalam mengembangkan usaha kecil untuk meningkatkan pendapatan bagi pengusaha kecil tidak terlepas keterkaitannya dengan cita-cita kemerdekaan negara kita yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Berpedoman pada asas bahwa pembangunan bukan untuk suatu golongan tertentu saja tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, maka dalam pembangunan ini seluruh lapisan masyarakat dapat ikut berpartisipasi guna meningkatkan pembangunan nasional. Untuk dapat meningkatkan produksi dari pengusaha kecil tersebut dibutuhkan dana yang dapat menguasai faktor – faktor produksi guna kegiatan usahanya, maka lembaga-lembaga keuangan

dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyat di Kudus berperan membantu untuk menyediakan dana kredit bagi pengusaha kecil meliputi pemberian kredit fasilitas Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi.

Menurut pendapat dari bapak Rahman, SE²¹ salah satu karyawan Bank Perkreditan Rakyat “Dananta” Kudus, kredit investasi ini hanya diberikan kepada pengusaha kecil yang berekonomi lemah yang digunakan untuk semua kegiatan struktur ekonomi terutama unit-unit yang menghasilkan barang dan jasa.

Sedangkan Kredit modal kerja menurut beliau merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil dengan persyaratan dan prosedur khusus guna pembiayaan modal yang digunakan terus menerus untuk kelancaran usahanya.

Sebelum memberikan kredit modal kepada nasabah/pengusaha kecil menurut Bapak Azis²² salah satu karyawan Bank Perkreditan Rakyat “Bali Budikusuma Mandiri” dilakukan identifikasi potensi ekonomi dan para calon nasabah, hal ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai penduduk miskin di desa guna menyusun strategi dan tujuan organisasi serta rencana kerja operasional seperti wilayah operasi, target nasabah, kredit dan tabungan, jumlah tenaga, biaya operasional, pendapatan perusahaan dan lain-lain. Hal ini perlu dilakukan karena pelayanan kredit kepada nasabah/pengusaha kecil bukan merupakan suatu bantuan belas kasihan, tetapi pemberian kredit yang harus dikembalikan oleh nasabah, sehingga meskipun ada besar jumlah

²¹ Wawancara dengan Bapak Rahmat, SE karyawan BPR “DANANTA” tanggal 1 Juli 2003.

²² Wawancara dengan Bapak Aziz, karyawan BPR “BALI BUDIKUSUMA MANDIRI” tanggal 7 Juli 2003.

nasabah miskin/pengusaha kecil, tetapi tanpa adanya unit usaha ekonomi yang berkembang didesa maka bank tidak dapat beroperasi dengan menguntungkan, kredit yang diberikan mungkin akan digunakan untuk konsumsi, bukan untuk mengembangkan usahanya atau membuka usaha baru karena wilayah domisili nasabah secara ekonomi kurang prospektif. Cara praktis identifikasi desa dan memilih calon nasabah sesungguhnya ditujukan untuk kegiatan Lembaga Keuangan Pedesaan/Bank Perkreditan Rakyat yang melayani orang miskin yang memerlukan kredit dalam jumlah kecil dibawah Rp 500.000, tetapi mungkin sebagian besar Bank Perkreditan Rakyat tersebut sudah memiliki metode atau sudah melakukan identifikasi wilayah dan calon nasabah diseluruh wilayah kerjanya.

Untuk mengetahui peran serta Bank Perkreditan Rakyat di Kudus bagi nasabah/pengusaha kecil dan yang mempengaruhi nasabah/pengusaha meminjam kredit di bank, maka dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 1. Umur dan Jenis Kelamin Responden

Umur	Pria	Wanita	Jumlah	Persentase
20 - 29 tahun	1	1	2	10 %
30 – 49 tahun	5	8	13	65 %
> 50 tahun	2	3	5	25 %
Jumlah	8	12	20	100 %

Sumber : data primer yang di olah.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa proporsi terbesar mengenai umur dan jenis kelamin responden yang meminjam di Bank Perkreditan Rakyat adalah wanita, yaitu sebesar 65 % yaitu antara umur 30-49 tahun.

Tabel 2. Jenjang Pendidikan Responden

	Pria	Wanita	Jumlah	Persentase
SD	2	2	4	20 %
SMP	2	2	4	20 %
SMU	6	4	10	50 %
Sarjana	2	0	2	10 %
Jumlah	12	8	20	100 %

Sumber : data primer yang diolah.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa proporsi terbesar mengenai jenjang pendidikan responden yang pinjam kredit adalah pria, sebesar 50 %.

Tabel 3. Jumlah Pinjaman Responden

Jumlah Kredit	Kredit Modal Kerja	Kredit Investasi	Jumlah	Persentase
Rp 1- 5 jt	2	1	3	15 %
Rp 5 –10 jt	5	2	7	35 %
Rp 10-15 jt	3	1	4	20 %
>Rp 15 jt	2	4	6	30 %
Jumlah	12	8	20	100 %

70

Sumber : data primer yang diolah.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa proporsi terbesar mengenai bentuk pinjam kredit dari Bank Perkreditan Rakyat yang paling dibutuhkan nasabah adalah kredit modal kerja, yaitu sebesar 35 % antara Rp 5-10 juta.

- Pembahasan

Bank Perkreditan Rakyat sebagai salah satu jenis bank yang keberadaannya diwujudkan untuk memberikan pelayanan jasa dibidang perbankan terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah yang ada dipedesaan, hal ini terdapat dalam tujuan dan tugas dari Bank Perkreditan Rakyat²³, yaitu :

1. melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
2. membantu lapisan masyarakat golongan ekonomi lemah agar tidak terjerat oleh rentenir.
3. menghimpun dana dari masyarakat pedesaan
4. pemberian kredit bagi pengusaha kecil atau masyarakat pedesaan.
5. menggali sumber keuangan dalam rangka menambah pendapatan asli daerah (khususnya untuk Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah).

²³ Pandu Suharto dan Mudhofir, *Ibid*, hal 30

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dan berdasarkan dengan pendapat para ahli, maka menurut peneliti dapat disimpulkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat di Kudus berperan dalam mengembangkan pengusaha kecil dengan pemberian fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi. Fasilitas kredit itu mempunyai persyaratan yang lunak dan prosedur sederhana yang bertujuan untuk membantu dan mendorong pengusaha kecil di desa untuk meningkatkan usaha yang bersifat padat karya.

Selain itu dengan didirikannya Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Kudus diharapkan dapat berperan serta dan membantu nasabah/pengusaha kecil dalam :

1. membantu calon nasabah membentuk, membina dan mengembangkan kelompok pengusaha kecil golongan ekonomi lemah dalam modal usaha.
2. mengusahakan agar kelompok sasarannya adalah kelompok termiskin dalam masyarakat di Kudus.
3. menyelenggarakan pelatihan ketrampilan yang sesuai kepada kelompok pengusaha/masyarakat rakyat miskin binaannya, serta melakukan kegiatan yang dapat membantu peningkatan pendapatan, peningkatan produksi, kelancaran peredaran barang dan jasa, dan memperluas kesempatan kerja
4. membantu lembaga keuangan desa/Bank Perkreditan Rakyat di Kudus dalam melakukan pemantauan penggunaan kredit dan pembinaan terhadap para nasabah.

B. Hambatan-hambatan Yang Mempengaruhi Pemberian Kredit Modal Bagi Pengusaha Kecil Di Kudus.

- Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang mempengaruhi pemberian kredit modal bagi pengusaha kecil di Kudus adalah:

1. Hambatan dari Bank Perkreditan Rakyat.

Semakin banyak lembaga-lembaga keuangan/bank yang beroperasi di wilayah kerja Kudus akan semakin besar persaingan merebut nasabah, lembaga keuangan seperti bank umum mungkin tidak perlu dikhawatirkan dalam persaingan merebut nasabah mikro karena pangsa pasar dan target grup yang dilayaninya berbeda dengan pangsa pasar Bank Perkreditan Rakyat di Kudus.

Persaingan antara Bank Perkreditan Rakyat di Kudus seharusnya tidak terjadi karena masing-masing telah ditetapkan wilayah kerjanya, yaitu kecamatan. Namun demikian perlu dicermati didaerah tertentu ada sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (umumnya memiliki aset besar) yang beroperasi sampai jauh diluar wilayah kerjanya, sebagian besar Bank Perkreditan Rakyat ini juga melayani nasabah dipasar-pasar kecamatan/desa, terutama yang memiliki tempat usaha permanen, sebagian lainnya bahkan memanfaatkan jasa pelepas uang dalam penyaluran kreditnya.

Lembaga keuangan yang akan menjadi pesaing berat dari Bank Perkreditan Rakyat di Kudus adalah lembaga keuangan non formal seperti

pelepas uang/rentenir, bank-bank keliling (Kosipa) dan tukang kredit barang serta pedagang pengumpul, tengkulak dan pedagang seringkali dijumpai bertindak sebagai bank pasar komoditi dan sekaligus monopoli dalam pasar uang, seperti pedagang pengumpul hasil pertanian yang juga memiliki toko, bandar barang bekas/loakan dan petani kaya yang memperoleh kelebihan dari hasil pertaniannya sehingga dapat membuka usaha perdagangan.

Persaingan pedagang atau petani kaya dengan Bank Perkreditan Rakyat di Kudus dapat terjadi dalam 2 (dua) hal yaitu, *pertama* kelompok-kelompok ini dapat menekan pengusaha kecil langganannya dengan berbagai cara untuk tidak berhubungan dengan bank, bila hal ini terjadi maka nasabah yang menerima kredit dari bank akan kehilangan pasar untuk menjual produknya sehingga akan mempengaruhi penghasilan usahanya. Contoh mengenai hal ini diantaranya adalah nasabah dari pengumpul barang bekas, bakul/tengkulak hasil pertanian hasil pertanian, pengrajin barang rumah tangga meubel/kayu dan pedagang kecil/warung/kios pengecer. *Kedua* kredit usaha yang telah diberikan oleh bank dapat digunakan oleh pengusaha kecil/nasabah untuk menutup pinjaman lama yang belum diterima dari lembaga keuangan non formal, bila hal ini terjadi maka kredit yang dipinjamkan kepada pengusaha kecil/nasabah akan macet.

Diantara faktor-faktor tersebut, menurut Bapak Hermanus, SE²⁴ Direktur dari PT.BPR "Dananta" Kudus yang menjadi hambatan bagi Bank Perkreditan Rakyat untuk menyalurkan dananya kepada pengusaha kecil di

²⁴ Bapak Hermanus, SE, Direktur PT. BPR "DANANTA" Kudus tanggal 2 Juli 2003.

Kudus adalah *pertama* kendala “jarak fisik” yaitu lembaga-lembaga keuangan pedesaan (LKP) dalam hal ini bank sebagian besar biasanya berlokasi di kota kecamatan dan atau pusat-pusat kegiatan ekonomi/pemerintahan, sedangkan calon nasabah jauh tinggal di pelosok desa. *Kedua* kendala “jarak sosial” yaitu kemiskinan dan rendahnya pendidikan para calon nasabah sehingga mereka tidak berdaya dalam menghadapi realitas makro, diantaranya tidak berhubungan dengan lembaga-lembaga keuangan pedesaan dalam hal ini bank, padahal sebenarnya mereka memerlukan pinjaman untuk berbagai keperluan. Hal ini dapat dilihat karena seringkali para calon nasabah meminjam uang dari para pelepas uang/rentenir meskipun dengan beban bunga yang lebih tinggi, karena lembaga keuangan informal ini lebih dekat dengan mereka dan tanggap atas keperluan mereka.

Disamping dua kendala tersebut diatas menurut responden Bapak Akhmad Moktar²⁵, Direktur dari PT.BPR “Bali Budikusuma Mandiri” kudu persoalan yang sering di hadapi para nasabah/pengusaha kecil di Kudus adalah berpusat pada rendahnya pendidikan dan pengalaman sehingga mengakibatkan kurangnya keahlian dalam bidang pemasaran, kelemahan berorganisasi dan manajemen usaha serta terbatasnya modal, sehingga para calon nasabah lebih meminjam uang kepada para rentenir yang telah dekat dengan mereka daripada kepada bank.

2. Hambatan dari para nasabah

²⁵ Wawancara dengan Bapak Akhmad Moktar, Direktur PT.BPR “BALI BUDIKUSUMA MANDIRI” Kudus tanggal 8 Juli 2003.

Pada umumnya nasabah/pengusaha kecil yang ada di Kudus malas datang ke bank bila mereka membutuhkan pinjaman atau ingin menabung uang, hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan dan pengetahuan mereka tentang bank sebaliknya bank juga menunggu calon nasabah yang memerlukan pinjaman atau menabung datang ke kantor bank, hal ini tidak saja terjadi pada bank-bank umum tetapi juga di sebagian lembaga-lembaga keuangan pedesaan seperti Bank Perkreditan Rakyat, sehingga dalam pengembangan usahanya, pengusaha kecil terbatas dalam permodalan dan ketrampilan yang hanya mampu melakukan kegiatan di bidang tertentu, sehingga hasil usahanya tersebut terbatas dari apa yang di kerjakan. Keadaan ini disebabkan oleh berbagai faktor yang terdapat pada nasabah maupun pada lembaga-lembaga keuangan dalam hal ini Bank.

Menurut responden ibu Handoko²⁶ salah nasabah satu Bank Perkreditan Rakyat "Dananta" Kudus yang menjadi penghambat para nasabah meminjam uang di bank adalah masalah jaminan dan penjamin.

Sedangkan menurut responden Ibu Sumiati²⁷ nasabah Bank Perkreditan Rakyat "Dananta" Kudus yang menjadi penghambat dalam meminjam uang di Bank Perkreditan Rakyat adalah mahalny biaya transaksi keuangan, dan masalah kelayakan usaha nasabah.

Sedangkan menurut responden bapak Sulchan Hadi²⁸ nasabah Bank Perkreditan Rakyat "Bali Budikusuma Mandiri" yang menjadi penghambat dalam meminjam uang di Bank Perkreditan Rakyat adalah masalah sistem

²⁶ Wawancara dengan ibu Handoko nasabah BPR, tanggal 1 Agustus 2003.

²⁷ Wawancara dengan ibu Sumiati nasabah BPR, tanggal 1 Agustus 2003.

²⁸ Wawancara dengan bapak Sulchan Hadi nasabah BPR, tanggal 5 Agustus 2003.

administrasi dan pembukuan yang terdapat di bank dan terbatasnya pinjaman kredit modal di Bank Perkreditan Rakyat, serta prosedur dan persyaratan-persyaratan transaksi yang banyak memakan waktu. Maka wajar saja kalau para nasabah lebih memilih pinjam uang kepada para rentenir walaupun dengan resiko bunga yang lebih tinggi

- Pembahasan

Dalam dunia perbankan terdapat suatu prinsip yang senantiasa dipegang teguh yaitu bahwa kredit yang disalurkan atau dikeluarkan kepada nasabah harus dapat diterima kembali sesuai dengan perjanjian, lebih-lebih karena uang tersebut adalah uang yang dipercayakan masyarakat kepadanya, oleh karena itu sebelum bank memberikan kredit kepada nasabah harus memperhatikan prinsip "The Five C's of Credit Analysis"²⁹, yaitu :

1. Character (kpribadian, watak)
2. Capacity (kemampuan/kesanggupan)
3. Capytal (modal kekayaan)
4. Colleteral (jaminan, agunan)
5. Condition (kondisi ekonomi)

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas serta berdasarkan pendapat para ahli, maka menurut peneliti kendala *jarak fisik* dan *jarak sosial* dan kendala-kendala lainnya dapat dijembatani apabila petugas-petugas dari

²⁹ Mgs Edi Putra, Tje Anan, *Ibid*, hal 12-15.

lembaga keuangan (bank) dibekali dengan ketrampilan khusus untuk melayani para calon nasabah.

Bekal ketrampilan ini sesungguhnya bukan suatu hal yang baru, tetapi merupakan pelengkap dari cara-cara pendekatan pelayanan keuangan yang selama ini sudah di kuasai dan diterapkan kepada para nasabah.

Untuk memperoleh informasi mengenai hal ini, maka jalan efektif yang harus dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat di Kudus adalah melakukan pengamatan intensif setiap waktu baik sebelum maupun setelah penyaluran kredit kepada nasabah. Untuk memperoleh informasi ini diperlukan kejelian dan keahlian tersendiri dari petugas lapangan.

C. Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Bank Perkreditan Rakyat di Kudus Bila Terjadi Hambatan-hambatan.

- Hasil Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa usaha pokok bank adalah memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas dan peredaran uang, sedangkan sumber utama pendapatan bank adalah bunga kredit, kredit – keredit yang dilepaskan oleh bank kepada nasabah perlu pengamanan, sebab jika tidak bank akan sulit untuk menghindari adanya, resiko yang datang sebagai akibat tidak berprestasinya nasabah / nasabah lalai³⁰.

³⁰ Bank Indonesia, *Proyek Kredit Mikro-Pengentasan Kemiskinan Melalui Kredit*, Jakarta, 1997.

Walaupun Bank Perkreditan Rakyat telah melakukan tindakan yang berupa pengamanan dalam pemberian kredit, dengan memberikan syarat adanya barang jaminan untuk mengikat pinjaman kredit yang diberikan kepada nasabah dan juga memberikan pembinaan terhadap debitur untuk memanfaatkan dan menggunakan dengan sebaik – baiknya kredit / pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan usaha yang dimilikinya sehingga setelah tiba saat mengatur kredit, debitur tidak mengalami kesulitan.

Namun demikian tidak jarang debitur menunggak / ingkar janji dalam angsuran sehingga mengakibatkan macetnya kredit yang diberikan Bank Perkreditan Rakyat tersebut. Ketentuan kredit macet ialah sejak tidak ditepatinya atau dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Menurut pendapat responden ibu Imah, SE³¹ manajer kredit Bank Perkreditan Rakyat “Dananta” Kudus, suatu kredit digolongkan macet apabila sebagai berikut :

- Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan.
- Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 3 bulan sejak diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit.
- Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan ke Pengadilan Negeri / Badan Urusan Piutang Negera.

Dalam menentukan kredit itu macet, Bank Perkreditan Rakyat mamakai ketentuan dalam perjanjian pengakuan utang/perjanjian kredit, misalnya dalam

³¹ Wawancara dengan ibu Imah, SE, Manajer Kredit PT.BPR “DANANTA” Kudus, tanggal 5 Agustus 2003.

perjanjian kredit disebutkan bahwa kredit atau pinjaman, diberikan dalam jangka waktu tiga bulan, sehingga apabila nasabah tersebut dinyatakan lalai/ tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Ketentuan lain apabila jangka waktu belum jatuh tempo namun berdasar penilaian Bank Perkreditan Rakyat pada nasabah, bahwa nasabah tersebut mempunyai etikat yang tidak baik untuk melunasi hutangnya, maka ia dapat dinyatakan lalai.

Macetnya kredit yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat tersebut, menurut bapak Antonius Widjaja³² manajer kredit Bank Perkreditan Rakyat “Bali Budikusuma Mandiri” dapat disebabkan karena :

1. Kesalahan dari diri nasabah / Peminjam
2. Kesalahan dalam perjanjian kreditnya

1. Kesalahan dari diri nasabah / Peminjam

Hal ini disebabkan karena :

- Penyalahgunaan dana yaitu karena dana kredit yang diberikan Bank Perkreditan Rakyat tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.
- Sejak semula memang peminjam kredit mempunyai etikat tidak baik.
- Kondisi ekonomi dari peminjam.
- Jumlah kredit lebih besar lebih besar dari usaha nasabah sehingga kemampuan pengembalian kredit tidak sepadan dengan jumlah pendapatan yang diperoleh.
- Peminjam meninggal dunia dan tidak ada barang jaminan.

³² Wawancara dengan bapak Antonius Widjaja, Manajer Kredit PT.BPR “BALI BUDIKUSUMA MANDIRI” Kudus, tanggal 8 Agustus 2003.

2. Kesalahan dalam perjanjian kreditnya

Dalam praktek perbankan faktor tidak dilaksanakan kewajiban membayar angsuran kredit disebabkan oleh :

- Musnahnya barang jaminan karena keadaan terpaksa.
- Penerima kredit melakukan wanprestasi.
- Nasabah Bank Perkreditan Rakyat tersebut mengalami kepailitan.

Langkah – langkah yang ditempuh oleh Bank Perkreditan Rakyat dalam mengamankan kreditnya menurut beliau pada pokok dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

- Pengamanan Proventif
- Pengamanan Represif.
- ☞ Pengamanan Preventif yaitu pengamanan yang dilakukan untuk mencegah kredit macet.
- ☞ Pengamanan Represif yaitu pengamanan yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami ketidaklancaran/kredit macet.

Untuk dapat memelihara kepentingan masyarakat dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi daerah, maka Bank Perkreditan Rakyat dalam melaksanakan penagihan tunggakan kredit/penyelesaian dana kredit macet tersebut, Bank Perkreditan Rakyat melakukan upaya sebagai berikut :

1. Diperingatkan secara tertulis oleh Bank Perkreditan Rakyat yang memberikan peringatan kepada debitur bahwa jangka waktu pengembalian pinjaman telah lewat, sedangkan debitur masih mempunyai tunggakan

kredit, maka debitur dimintai keterangan mengapa ia sampai mengalami keterlambatan dalam membayar kreditnya.

2. Tahap peringatan awal.

Apabila setelah satu bulan diberi kelonggaran masih belum membayar, maka pihak Bank Perkreditan Rakyat akan memberikan surat peringatan kepada nasabah yang bersangkutan.

3. Tahap mengikuti perkembangan.

Pihak Bank Perkreditan Rakyat masih memberikan kepada debitur untuk melunasi kreditnya sampai batas waktu 3 bulan, sambil mengikuti perkembangan pihak Bank Perkreditan Rakyat akan menarik atau meminta debitur menyerahkan barang jaminan yang dijaminkan atas hutang kreditnya.

4. Tahap tindakan tegas.

Apabila dalam jangka waktu 3 bulan setelah kredit dinyatakan macet dan kelonggaran yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat kepada debitur tidak dipenuhi, satu usaha damai tidak berhasil, maka bank akan melaksanakan haknya untuk melelang benda jaminan dihadapan umum atau menjual dibawah tangan oleh debitur dengan pengawasan dari Bank Perkreditan Rakyat, bila perlu Bank Perkreditan Rakyat akan minta bantuan Pengadilan Negeri dari Badan Urusan Piutang Negera.

Hasil dari penjualan benda jaminan tersebut, oleh Bank Perkreditan Rakyat digunakan untuk :

- Membayar angsuran kredit.

- Membayar bunga tunggakan kredit.
- Membayar harga-harga lain yang telah dikeluarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat dalam juga melelang benda jaminan.

Bila kita memperhatikan ketentuan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa posisi pemberian kredit (bukti) lebih kuat dibanding dengan penerima kredit. Ketentuan yang mengatur hak bank lebih menonjol dapat yang mengatur tentang kewajiban bank, satu-satunya kewajiban ialah menyediakan dana/kredit selama jangka waktu yang ditentukan, itupun masih digantungkan kepada berbagai syarat yaitu jika penerima kredit memenuhi kewajibannya.

- Pembahasan

Pemberian kredit perlu mendapat perhatian khusus oleh bank, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan analisa terhadap kredit yang disalurkan, tujuannya agar pemberian kredit itu mencapai sasarannya yaitu³³ :

1. aman, mengembalikan kredit sesuai perjanjian.
2. kredit yang digunakan sesuai dengan permohonan kredit.
3. menghasilkan, maksudnya kredit menghasilkan bagi bank dan nasabah.

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas serta berdasarkan pendapat para ahli, menurut peneliti kredit merupakan usaha utama dari Bank Perkreditan Rakyat, karena itu sudah seharusnya bahwa setiap tahapan pemberian kredit mendapat perhatian, agar tujuan dan sasaran pemberian kredit tersebut dapat tercapai, oleh karena itu diperlukan pengawasan terhadap

³³ Mohammad Djumhana, *Op Cit*, hal 241-242.

kredit yang disalurkan kepada nasabah guna menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan, tujuan ini dapat tercapai jika tercipta pemberian kredit yang sehat dalam arti dapat ditarik kembali sesudah waktu jatuh temponya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada pada Bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Kudus berperan serta bagi masyarakat/ pengusaha kecil dalam hal :
 - Membantu meningkatkan hasil produksi, memperluas usaha kecil ditingkat pedesaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan memperluas kesempatan kerja.
 - Selain memberikan kredit, pihak bank juga memberi pengarahan tentang manajemen perusahaan, organisasi dan pemasaran hasil produksi agar dapat bersaing.
2. Hambatan – hambatan yang mempengaruhi Bank Perkreditan Rakyat dalam pemberian kredit bagi pengusaha kecil di Kudus adalah “*jarak fisik*” yaitu jarak lembaga keuangan (bank) berada di Kota atau tempat kegiatan ekonomi/pemerintahan sedangkan para calon nasabah berada di pelosok desa, “*jarak sosial*” yaitu kemiskinan dan rendahnya pendidikan para calon nasabah, juga juga masalah jaminan dan penjamin, mahal nya biaya transaksi kredit, kelayakan usaha nasabah, sistem administrasi dan pembukuan, modal kredit yang di pinjamkan BPR kecil dan masalah prosedur serta persyaratan transaksi.

3. Upaya penyelesaian hambatan – hambatan yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat di Kudus adalah dengan cara :

- Meneliti sebab – sebab tidak lancarnya kredit yang nantinya mengarah pada kredit macet.
- Tindakan selanjutnya setelah melihat adanya kesanggupan untuk mengembalikan angsuran dari debitur, maka nasabah diharuskan mengangsur akan tetapi bila tidak sanggup lagi, maka permasalahan tersebut diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negera yang akan memproses selanjutnya.

B. Saran

1. Kepada Bank Perkreditan Rakyat melaksanakan dalam mengadakan pengawasan dan pengarahan terhadap kredit harus selektif mungkin dan harus dilakukan dengan cara khusus yang berkaitan dengan 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition.
2. Kepada nasabah disarankan sebelum meminjam uang di bank, nasabah harus memperhitungkan kemampuan jika membayar angsuran kembali dengan demikian pinjaman yang diambil dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu kredit.

Daftar Pustaka

1. Badrul Zaman Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
2. -----, *Perjanjian Kredit Perbankan*, Alumni, Bandung, 1993.
~ Bank Indonesia, *Proyek Kredit Mikro-Pengentasan Kemiskinan melalui Kredit*, Jakarta, 1997.
~ -----, *Proyek Kredit Mikro-Cara Praktis Identifikasi Desa dan Memilih Calon Nasabah*, Jakarta, 1997.
~ BCA, *Penenalan dan Pengantar Operasional Bank*, Pusdiklat BCA, Kantor Pusat, Jakarta, 1997.
3. Bambang Sunggono, 1995, *Pengantar Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Jember.
4. Djuhono Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
5. Edi Putro Tje Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberti, Yogyakarta, 1989.
6. Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1996.
7. Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, 1994.
8. Pandu Suharto dan Mudhofir, *Peran dan Fungsi Bank Perkreditan Rakyat*, Jakarta, 1999.
9. Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
10. Rudi Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, Yogyakarta, 1993.
11. Setiawan R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987.

12. Simorangkir, OP, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persana Indonesia, 1979.
13. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
14. Subekti, *Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1987.
15. Suyatno Thomas, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
16. -----, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
17. Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia)*, Alumni, Bandung, 1986.